



STANDAR KEBUTUHAN PILKADA TERBIT

Anggaran Pilwali Yogya Dinilai Hemat

YOGYA (KR) - Standar kebutuhan pilkada 2017 akhirnya diterbitkan oleh KPU RI. Merujuk pada acuan tersebut, anggaran Pilwali Yogya yang disusun KPU Kota Yogya dinilai hemat lantaran berada di bawah standar. Salah satunya terkait rasionalisasi honor bagi tim ad-hoc yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogya, Kadri Renggono menuturkan, pihaknya sebenarnya sudah siap menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilwali yang diajukan KPU Kota Yogya. "Sejak Maret lalu, kepala daerah sudah siap untuk tanda tangan NPHD. Tapi saat itu ada ketentuan untuk menunggu penerbitan standar kebutuhan yang menjadi ranah KPU RI. Kalau anggaran itu di bawah standar, berarti sudah cukup bagus," urainya, Minggu (1/5).

Lain halnya jika pengajuan anggaran ternyata di atas standar, maka dipastikan akan banyak perubahan lantaran dinilai pemborosan. Akan tetapi manakala di bawah standar, berarti penyusunan anggaran sudah mengedepankan pencermatan serta tidak mengalami persoalan dan bisa langsung dikucurkan.

Merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 terkait tahapan pilkada serentak 2017, NPHD sudah harus ditandatangani oleh kepala daerah paling lambat hingga 22 Mei 2016. Oleh karena itu, KPU Kota Yogya sebenarnya masih memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian, apakah akan menambah anggaran atau tetap seperti semula.

Komisioner KPU Kota Yogya, Sri Surani menuturkan, pihaknya masih perlu koordinasi dengan dewan selaku mitra kerja dalam bidang penganggaran. Kendati ada kemungkinan untuk menambah anggaran, namun alokasi Rp 14,9 miliar yang diajukan ke Pemkot Yogya sudah mencukupi. "Kami tetap akan merevisi beberapa pos anggaran sesuai standar dari KPU RI. Tapi revisi itu kemungkinan tidak akan menambah anggaran, tetap seperti semula," tandasnya.

Sri Surani mencontohkan, dalam standar kebutuhan pilkada honor bagi kelompok kerja (pokja) atau tim ad-hoc ditentukan Rp 2 juta. Tapi pihaknya mengalokasikan di bawah standar yakni sekitar Rp 1,3 juta dengan mempertimbangkan skala upah di Kota Yogya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005